



LAPORAN EVALUASI

TW I



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
(DISKOMINFO-SP)**

KABUPATEN LUWU TIMUR

2025

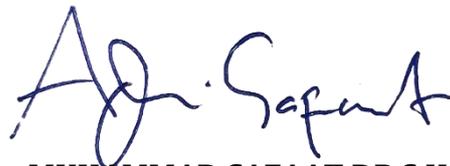
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, April 2025
Plt. Kepala Dinas



MUHAMMAD SAFAAT DP.S.Kom

Pangkat: Pembina/IV-a

NIP. 19770731 200604 1 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Kondisi/Struktur Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo-SP	4
1.5 Isu-Isu Strategis/Permasalahan.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis 2021-2026	7
2.2 Visi dan Misi Tahun 2021-2026	7
2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	9
2.4 Penetapan Kinerja.....	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV. PENUTUP	38
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan

menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 bulan (Triwulan I Tahun 2025).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis Triwulan I Tahun 2025 kepada stakeholder guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2025 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Kondisi/Struktur Organisasi

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana yang termaktum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dipimpin oleh :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Aplikasi dan Informatika terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 1 orang;

3. Bidang Telematika dan Persandian terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 2 orang;
4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda 1 orang;
5. Bidang Statistik terdiri:
 - a. Kepala Bidang;

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka dapat dilihat kondisi organisasi Tahun 2025 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Gol. IV.a	5 Orang
2	Penata Tk. I, Gol III.d	4 Orang
3	Penata , Gol III.c	2 Orang
4	Penata Muda Tk. I, Gol III.b	5 Orang
5	Penata Muda, Gol III.a	1 Orang
6	Pengatur Tk. I , Gol II.d	2 Orang
7	PPPK	3 Orang
JUMLAH		22 Orang

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Pegawai Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Eselon III.b	4 Orang
2	Eselon IV.a	3 Orang
3	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	3 Orang
4	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	1 Orang
5	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda (PPPK)	3 Orang
6	Staf Pelaksana	8 Orang
JUMLAH		22 Orang

c. Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2025 keadaan pegawai Dnas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata Dua (S2)	5 Orang
2	Strata Satu (S1)	12 Orang
3	D3	2 Orang
4	SMA/STM	3 Orang
JUMLAH		22 Orang

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

1.4.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1.4.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Isu-Isu Startegis/permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Terdapat kegiatan teknis yang belum dibayarkan pada pihak ketiga karena belum ada penagihan.
2. Proses Pembayaran SPJ juga mengalami kendala karena keterbatasan UP sehingga mempengaruhi efektifitas daya serap anggaran.
3. Pengolahan data pada bidang statistic masih mengandalkan pihak ketiga karena keterbatasan SDM yang ahli dalam bidang statistic.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

2.1 Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencanapembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

2.2 Visi dan Misi Tahun 2021 - 2026

Visi Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu **"Kabupaten Luwu Timur yang**

Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini salingterkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar dimasa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadikeunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Misi Ke-4 RPJMD :

“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”

Tujuan Ke-4 RPJMD:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani”

Tujuan Sasaran Strategis :

- 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan**
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.**

2.3 Sasaran Starategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3.16
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96.56
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Kominfo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,75

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Adapun untuk mencapai tiga sasaran tersebut diatas perlu untuk ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran utama pada renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut:

1. Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan mendasarkan pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik, semula penghitungan SPBE mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP untuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan. Indikator dari sasaran ini adalah Nilai SAKIP. Nilai SAKIP tersebut diperoleh melalui opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n.

2.4 Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2025.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2025, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025.

Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Adapun Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 6.

Tabel 5.

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunkas Informatika Statistik dan Persandian Kerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Hasil evaluasi dari Kemenpan RB	Angka	3.16
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi provinsi sulawesi Selatan	Angka	96.56
3	Nilai SAKIP Kominfo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	78,75

Tabel 6.

**Penetapan Kinerja Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Tahun 2025**

No	Nama Program	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	%	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan	Persentase Informasi daerah yang dipublikasikan	%	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika pemerintahan daerah	Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika	%	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya penggunaan data statistik daerah untuk penggunaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang mengakses data statistik untuk perumusan perencanaan perangkat daerah	%	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasipemrintah	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

❖ Pengukuran dan Analisis Kinerja

Secara Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki 3 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatannya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan rasio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

TUJUAN I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

1	<u>Sasaran Startegis 1</u> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik
----------	--

Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah merupakan Usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB).

❖ **Capaian Kinerja sasaran Strategis :**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		Capaian
			Target 2025	Realisasi 2024	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Angka	3,16	3,16	100

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 yaitu 3.16 dari target 3,16 atau dengan tingkat capaian 100%. Realisasi Kinerja sasaran Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik pada TW I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi capaian Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena capaian untuk penilaian evaluasi Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2025 dilakukan pada TW IV Tahun 2025.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2023			2024		Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi 2024	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Angka	2,50	3,05	122%	3,10	3,16	102%

Tahun 2023 adalah 3,05 atau predikat Baik, dimana target awal adalah 2,50. Selanjutnya pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mencapai peningkatan dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu mencapai 3,16 atau 102%.

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu 3.16 Sementara Untuk Capaian Realisasi Tahun 2025 Triwulan I masih menggunakan capaian Realisasi Akhir Tahun 2024 yakni 3,16 Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 100%.

Tabel 7
Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian	Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	persen	3,10	3,16	102%	3	101%

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik antara lain :

- Tersedianya anggaran yang memadai untuk pengembangan aplikasi
- Meningkatnya pengamanan aplikasi yang telah dikembangkan
- Meningkatkan kompetensi SDM terkait pengamanan jaringan
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada
- Meningkatkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah, Puskesmas dan BPP dalam pelayanan koneksi jaringan internet.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Kurangnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan aplikasi.
- Kurangnya sumber daya aparatur yang menguasai Teknik keamanan jaringan

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan koordinasi yang baik dengan semua OPD dan unit kerja yang terkait.

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2025	REALISASI ANGGARAN S.D TANGL 31 MARET 2025	
			POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.980.793.250	615.369.750	95.451.761	15,51
01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.443.853.750	429.760.750	15.120.000	3,52
	1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	2.443.853.750	429.760.750	15.120.000	3,52
02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	536.939.500	185.609.000	80.331.761	43,28
	1	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	536.939.500	185.609.000	80.331.761	43,28
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	191.926.150	114.671.650	8.188.000	7,14
01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	191.926.150	114.671.650	8.188.000	7,14
	1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	116.893.150	70.864.650	4.188.000	5,91
	2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	75.033.000	43.807.000	4.000.000	9,13
III		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	37.278.200	10.847.200	-	0,00
01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.278.200	10.847.200	-	0,00
	1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.278.200	10.847.200	-	0,00
TOTAL BELANJA			3.209.997.600	740.888.600	103.639.761	13,99

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran I yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik sebesar Rp 3.209.997.600,- dengan realisasi sebesar Rp.103.639.761,- atau dengan tingkat capaian 13,99 %.

❖ **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik**

Terdapat 3 (Tiga) program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis Elektronik yaitu :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Adapun bebarapa indikator yang menunjang pencapaian program pengelolaan aplikasi informatika yaitu ini :

1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi Internet

Target Perangkat Daerah yang direncanakan terkoneksi internet pada Tahun 2025 adalah 43 Perangkat Daerah dan untuk triwulan I targetnya adalah 43 Perangkat Daerah dan realisasi triwulan I adalah 43 Perangkat Daerah atau 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet / Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

2. Persentase ruang publik yang terkoneksi internet

Target ruang publik yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2025 adalah sebanyak 20 unit area publik dengan rincian 9 ruang publik yang ada di ibu kota kabupaten dan 11 di ibu kota kecamatan. Untuk target triwulan I adalah 20 area publik dan realisasi triwulan I adalah 20 area publik atau 100%. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Ruang Publik yang terakses internet / Jumlah Ruang Publik yang menjadi sasaran pemasangan jaringan internet x 100%)”.

3. Persentase Puskesmas yang terkoneksi Internet

Target Jumlah Puskesmas yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2025 adalah sebanyak 15 Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Untuk target triwulan I adalah 15 Puskesmas dan realisasi triwulan I adalah 15 Puskesmas atau 100%. Adapun Formulasi indikator

yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet / Jumlah keseluruhan Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

4. Persentase BPP yang terkoneksi Internet

Target Jumlah BPP yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 BPP. Untuk target triwulan I adalah 11 BPP dan realisasi triwulan I adalah 11 BPP atau 100%. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah BPP yang terakses internet / Jumlah BPP yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

5. Persentase Rumah Dinas Jabatan yang terkoneksi Internet

Target jumlah rumah dinas jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet kominfo pada tahun 2025 adalah sebanyak 22 Rumah Dinas Jabatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan rincian 5 titik yaitu 4 Rujab Bupati, 2 Rujab Wakil Bupati, 2 Rujab Ketua DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua I DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua II DPRD, 1 Rujab Sekretaris Daerah, dan 11 Rujab Kecamatan. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terakses internet / Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.

6. Persentase Aplikasi E- Government yang dibangun

Target jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 unit (aplikasi). Untuk target triwulan I adalah 2 unit (aplikasi) dan telah terealisasi sebanyak 2 aplikasi. Adapun aplikasi yang telah dibangun yaitu Pengembangan aplikasi REMISI, dan aplikasi BALUTTA. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun x 100%)”.

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Untuk Indikator Pencapaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu Persentase OPD yang mengakses Data Statistik Sektoral Daerah untuk Perencanaan Pembangunan. Untuk OPD yang mengakses Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral ada beberapa Dinas yang terkait pada kegiatan ini sehingga data yang berkaitan dengan program ini belum dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan untuk kegiatan sosialisasi diadakan pada TW III. Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia ini mengukur target Dokumen (Cetak Buku) yang dimana kegiatan ini dilaksanakan pada TW IV. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral daerah dalam perencanaan pembangunan / Jumlah OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur)”

3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator yang menunjang pencapaian program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan. Target pada Tahun 2025 untuk Kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang adalah sebanyak 43 perangkat daerah. Target untuk triwulan I adalah 43 perangkat daerah dan telah terealisasi 100% untuk triwulan I. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Aplikasi perangkat daerah yang diamankan / Jumlah perangkat daerah.”

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung tersebut antara lain :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2025	Target Kinerja TW I	Realisasi Kinerja TW I	% Capaian Realisasi Kinerja TW I
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain dan Koneksi Internet OPD Se Kabupaten Luwu Timur	100	50	50	50

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen pengelolaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah serta domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	0	0	0
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pemerintahan Berbasis E-governemnt yang dikelola	100	50	50	50
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	4 Unit (aplikasi)	2 unit (aplikasi)	2 Unit (aplikasi)	50
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	100	0	0	0
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang rilis tepat waktu	85 Persentase	0	0	0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	0	0	0
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi Pemerintah Daerah yang diamankan	100	100	100	100
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	43 perangkat Daerah	43 perangkat Daerah	43 perangkat Daerah	100

1	Sasaran Startegis 2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
----------	---

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada proses atau kondisi di mana akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik semakin terbuka dan transparan. Tujuan utama dari meningkatnya keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.

❖ **Capaian Kinerja sasaran Strategis :**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		Capaian
			Target 2025	Realisasi 2024	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,56	96,55	99.98

Capaian Nilai keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yaitu 96,55 dari target 96,56 atau dengan tingkat capaian 99,98%. Realisasi Kinerja sasaran Nilai keterbukaan Informasi Publik pada TW I Tahun 2025 masih menggunakan realisasi capaian Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena capaian untuk penilaian evaluasi Nilai keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilakukan pada TW II Tahun 2025.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Pada Tahun 2024 target nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah 96,56, realisasi nilai nya 96,55 atau capaian sebesar 99,98% sedangkan tahun 2023 target 87, realisasi 96.55 atau capaian sebesar 111%. Untuk nilai tahun 2024 masih menggunakan nilai tahun 2023.

	Indikator Kinerja	Sat	Target	2023		2024		Capaian
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	87	96,55	111%	96,56	96.55	99,98%

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah**

Target akhir Renstra Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu 92 Sementara Untuk Capaian Tahun 2025 Triwulan I masih menggunakan capaian Akhir Tahun 2023 yakni 96.55 Sehingga Tingkat capaian terhadap target akhir Renstra yaitu 104%.

Tabel 8
Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	persen	96,56	96.55	99,98%	92	104%

Adapun indikator kinerja yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis II dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik disajikan dalam tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi	12.000 Informasi	1.500	125%

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik antara lain :

- Kurangnya SDM yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas
- Tersedianya anggaran yang memadai untuk memudahkan capaian kinerja

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain:

- Menyediakan anggaran sesuai dengan kebutuhan
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban khususnya media partner yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2025	REALISASI ANGGARAN S.D TANGL 31 MARET 2025	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.694.971.240	1.024.533.550	268.834.999	26,24
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.694.971.240	1.024.533.550	268.834.999	26,24
	1 Relasi Media	3.513.253.950	933.188.000	241.031.402	25,83
	2 Pelayanan Informasi Publik	87.112.050	46.687.050	16.903.597	36,21
	3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	72.621.850	30.868.500	10.900.000	35,31
	4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	21.983.390	13.790.000	-	0,00
TOTAL BELANJA		3.694.971.240	1.024.533.550	268.834.999	26,24

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran Perubahan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang mendukung Sasaran II yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp, 3.694.971.240- dengan realisasi triwulan I sebesar Rp. 268.834.999,- atau dengan tingkat capaian 26,24 %.

❖ **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik**

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah yang dikelola. Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung Program Informasi dan Komunikasi Publik yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2025	Target TW I	Realisasi Kinerja TW I	% Capaian Realisasi Kinerja TW I
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Publikasi Informasi pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media dan Kelompok Informasi Masyarakat	100	25	25	25
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Verifikasi dewan pers, 2. Terdaftar di Dinas Kominfo dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	3	3	25
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	10 Permohonan	1	1	10
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun Pemanfaatan Media berbayar sesuai Kriteria/Juknis	5 Media	5 Media	5 Media	100
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/Pelatihan	4 Orang	0	0	0

TUJUAN II : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

3	<p><u>Sasaran III</u> Meningkatnya Nilai Sakip</p>
---	--

Sasaran Strategis dari 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima untuk mengukur sasaran yang ketiga ini.

❖ **Capaian Kinerja Sasaran Strategis :**

Indikator dari Sasaran 3 adalah Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan target indikator yaitu 78,75. Realisasi dari sasaran ini belum dapat tercapai pada Triwulan I karena sementara menunggu penilaian dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat. Nilai SAKIP ini berdasarkan penilaian dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Pada Tahun 2023 target Nilai SAKIP adalah 64, realisasi nilai nya 78,50 atau capaian sebesar 122% sedangkan tahun 2024 target 78,51 realisasi 78,75 atau capaian sebesar 100%.

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2023			2024		Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	64	78,50	122%	78,51	78.75	100%

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 9.

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	persen	78,51	78.75	100%	70	112%

Dari Data diatas dapat dilihat bahwa Target Nilai LAKIP Dinas Kominfo – SP pada akhir tahun Renstra (target Jangka Menengah) yaitu 70 sementara realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 78.75 atau dengan Tingkat capaian kinerja terhadap target akhir Renstra sebesar 112%.

Pada Triwulan I Tahun 2025 Nilai SAKIP Dinas Kominfo - SP untuk Tahun 2025 belum rilis dari Inspektorat sehingga data capaian kinerja Sasaran 3 masih menggunakan data capaian Tahun lalu.

❖ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

a) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- Mengoptimalkan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program/ kegiatan/ dan sub kegiatan
- Tersedianya dokumen perencanaan yang memadai
- Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada
- Memaksimalkan pengarsipan dokumen
- Meningkatkan kedisiplinan ASN

b) Analisis Penyebab Kegagalan/ Permasalahan Kinerja

- Kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor
- Penggunaan ruangan tidak maksimal karena bangunan gedung kantor masih kecil.
- Melakukan pendataan barang-barang asset kantor secara kontinu sehingga barang yang sudah tidak layak dalam hal operasional kantordapat dilakukan penghapusan aset dan melakukan penggantian barang yang di usulkan pada tahun anggaran selanjutnya;

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET ANGGARAN KAS TW I TAHUN 2025	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2025	
		POKOK (Rp)		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.342.866.265	1.377.740.284	796.882.086	57,84
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.944.300	36.311.500	11.964.755	32,95
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.099.450	20.646.450	11.964.755	57,95
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.214.450	3.214.450	-	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.300.600	3.300.600	-	0,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.329.800	9.150.000	-	0,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.315.505.215	1.023.026.684	653.234.638	63,85
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.250.074.215	1.003.638.584	648.554.638	64,62
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.431.000	19.388.100	4.680.000	24,14
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.953.900	7.591.300	2.100.000	27,66
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	26.953.900	7.591.300	2.100.000	27,66
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.937.700	28.906.700	180.000	0,62
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.243.700	10.906.700	180.000	1,65
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.694.000	18.000.000	-	0,00
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.485.150	178.144.100	70.851.999	90,67
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	304.737.950	142.000.000	117.572.255	82,80
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.520.000	3.500.000	-	0,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	1.625.000	750.000	46,15
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	660.000	440.000	66,67
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000	10.000.000	7.000.000	70,00

	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.364.000	63.364.000	62.261.999	99,84
6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.000.000	123.000.000	-	0,00
	1	Pengadaan Mebel	14.000.0000	14.000.000	-	0,00
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.000.000	109.000.000	-	0,00
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.850.000	50.030.000	49.495.657	98,93
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	730.000	490.000	67,12
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000	8.800.000	22.005.657	250,06
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.000.000	40.500.000	27.000.000	66,67
8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.190.000	30.730.000	9.055.037	29,47
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.180.000	20.795.000	4.407.037	21,19
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.010.000	4.935.000	2.110.000	42,76
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	5.000.0000	2.538.000	50,76
TOTAL BELANJA			4.342.866.265	1.377.740.284	796.882.086	57,84

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Pokok yang mendukung pencapaian sasaran strategis III ini sebesar Rp 4.342.866.265.- dengan realisasi anggaran untuk TW I sebesar Rp 796.882.086,- atau dengan capaian sebesar 57,84%.

❖ Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP

Adapun kegiatan dan sub kegiatan pendukung sasaran meningkatnya nilai SAKIP yaitu :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja TW I	Realisasi Kinerja TW I	% Capaian TW I
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100	100	100

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1	1	33
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	1	50
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	1	50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	6	6	60
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	25	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	4	4	34
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100	100	100	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1	1	50
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100	100	100	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	3	3	25
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	0	0	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3	1	1	34

	Bangunan Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1	1	50
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	1	1	34
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	1	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	1	1	25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1	1	25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1	1	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1	1	25
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	100	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	6	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	100	100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	3	3	24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	3	3	60
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	1	50

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2025 pada Triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp **11.247.835.105,-**, sedangkan realisasi pada Triwulan I sebesar Rp **1.169.356.846,-** atau setara dengan capaian 10,40%. Target Anggaran Kas pada Triwulan I sebesar Rp. **3.143.162.434,-** sehingga capaian realisasi anggaran berdasarkan target anggaran kas yaitu 37,21%. Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Triwulan I

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D. 26 MARET 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						(6/5*100)	(5 - 6)	(8/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.342.866.265	1.377.740.284	796.882.086	57,84	580.858.198	42,16	3.545.984.179	81,65
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.944.300	36.311.500	11.964.755	32,95	24.346.745	67,05	95.979.545	88,92
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	3.214.450	3.214.450	-	0,00	3.214.450,00	100,00	3.214.450	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	3.300.600	3.300.600	-	0,00	3.300.600,00	100,00	3.300.600	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	45.329.800	9.150.000	-	0,00	9.150.000,00	100,00	45.329.800	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	56.099.450	20.646.450	11.964.755	57,95	8.681.695,00	42,05	44.134.695	78,67
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.315.505.215	1.023.026.684	653.234.638	63,85	369.792.046,00	36,15	2.662.270.577	80,30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	65.431.000	19.388.100	4.680.000	24,14	14.708.100,00	75,86	60.751.000	92,85
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	3.250.074.215	1.003.638.584	648.554.638	64,62	355.083.946,00	35,38	2.601.519.577	80,04

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75.937.700	28.906.700	180.000	0,62	28.726.700,00	99,38	75.757.700	99,76
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		33.243.700	10.906.700	180.000	1,65	10.726.700,00	98,35	33.063.700	99,46
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		42.694.000	18.000.000	-	0,00	18.000.000,00	100,00	42.694.000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		301.485.150	78.144.100	70.851.999	90,67	7.292.101,00	9,33	230.633.151	76,50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	6.500.000	1.625.000	750.000	46,15	875.000,00	53,85	5.750.000	88,46
	Fasilitas Kunjungan Tamu	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	28.000.000	10.000.000	7.000.000	70,00	3.000.000,00	30,00	21.000.000	75,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	2.640.000	660.000	440.000	66,67	220.000,00	33,33	2.200.000	83,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	250.364.000	62.364.000	62.261.999	99,84	102.001,00		188.102.001	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	5.520.000	1.380.000	-	0,00	1.380.000,00	100,00	5.520.000	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	8.461.150	2.115.100	400.000	18,91	1.715.100,00	81,09	8.061.150	95,27
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		123.000.000	123.000.000	-	0,00	123.000.000,00	100,00	123.000.000	100,00
	Pengadaan Mebel	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	14.000.000	14.000.000	-	0,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	109.000.000	109.000.000	-	0,00	109.000.000,00	100,00	109.000.000	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.190.000	30.730.000	9.055.037	29,47	21.674.963,00	70,53	113.134.963	92,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	83.180.000	20.795.000	4.407.037	21,19	16.387.963,00	78,81	78.772.963	94,70

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	19.010.000	4.935.000	2.110.000	42,76	2.825.000,00	57,24	16.900.000	88,90
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	20.000.000	5.000.000	2.538.000	50,76	2.462.000,00	49,24	17.462.000	87,31
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		269.850.000	50.030.000	49.495.657	98,93	534.343,00	1,07	220.354.343	81,66
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	105.600.000	8.800.000	22.005.657	250,06	(13.205.657,00)	-150,06	83.594.343	79,16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	2.250.000	730.000	490.000	67,12	240.000,00	32,88	1.760.000	78,22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	162.000.000	40.500.000	27.000.000	66,67	13.500.000,00	33,33	135.000.000	83,33
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		26.953.900	7.591.300	2.100.000	27,66	5.491.300,00	72,34	24.853.900	92,21
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos	26.953.900	7.591.300	2.100.000	27,66	5.491.300,00	72,34	24.853.900	92,21
02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		3.694.971.240	1.024.533.550	268.834.999	26,24	-	-	3.426.136.241	92,72
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.694.971.240	1.024.533.550	268.834.999	26,24			3.426.136.241	92,72
	Relasi Media	HAYATI, SE.MM	3.513.253.950	933.188.000	241.031.402	25,83	692.156.598	74,17	3.272.222.548	93,14
	Pelayanan Informasi Publik	HAYATI, SE.MM	87.112.050	46.687.050	16.903.597	36,21	29.783.453,00	63,79	70.208.453	80,60
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	HAYATI, SE.MM	72.621.850	30.868.500	10.900.000	35,31	19.968.500,00	64,69	61.721.850	84,99
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	HAYATI, SE.MM	21.983.390	13.790.000	-	0,00	13.790.000,00	100,00	21.983.390	100,00

03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		2.980.793.250	615.369.750	95.451.761	15,51	519.917.989,00	84,49	2.885.341.489	96,80
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.443.853.750	429.760.750	15.120.000	3,52	414.640.750,00	96,48	2.428.733.750	99,38
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	ARIEF FADILLAH, S.Kom	2.443.853.750	429.760.750	15.120.000	3,52	414.640.750,00	96,48	2.428.733.750	99,38
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		536.939.500	185.609.000	80.331.761	43,28	105.277.239,00	56,72	456.607.739	85,04
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	MUH. SAFAAT DP, S.Kom	536.939.500	185.609.000	80.331.761	43,28	105.277.239,00	56,72	456.607.739	85,04
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		191.926.150	114.671.650	8.188.000	7,14	106.483.650,00	92,86	183.738.150	95,73
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		191.926.150	114.671.650	8.188.000	7,14	106.483.650,00	92,86	183.738.150	95,73
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	HAERUDDIN, S.Kom	116.893.150	70.864.650	4.188.000	5,91	66.676.650,00	94,09	112.705.150	96,42
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	HAERUDDIN, S.Kom	75.033.000	43.807.000	4.000.000	9,13	39.807.000,00	90,87	71.033.000	94,67
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		37.278.200	10.847.200	-	0,00	10.847.200,00	100,00	37.278.200	100,00
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		37.278.200	10.847.200	-	0,00	10.847.200,00	100,00	37.278.200	100,00

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ARIEF FADILLAH, S.Kom	37.278.200	10.847.200	-	0,00	10.847.200,00	100,00	37.278.200	100,00
TOTAL BELANJA			11.247.835.105	3.143.162.434	1.169.356.846	10,40	1.973.805.588,00	62,80	10.078.478.259	89,60

BAB IV

PENUTUP

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat tentang capaian kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada triwulan I Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memberi gambaran tentang capaian dari setiap target yang direncanakan, serta kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target.

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan ini dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya serta dapat memberi gambaran langkah-langkah percepatan pencapaian target yang telah direncanakan untuk tahun 2025. Laporan Kinerja Triwulanan ini sangat mempermudah dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Malili, April 2025
Plt. **Kepala Dinas,**



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom

Pangkat :Pembina IV.a

NIP. 19770731 2006041 019

L

A

M

P

I

R

A

N



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981

Telp/Fax : (0474) 321/(0474) 321 337

Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

Malili, 11 April 2025

Kepada

Nomor : 000.1.1/212.a/Kominfo/2025
Lampiran : _
Hal : **Undangan Rapat Evaluasi
Triwulan I**

Yth. **1. Para Kepala Bidang
2. Para Kasubag
3. Bendahara
Masing-Masing
Di_ _
Tempat**

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Permintaan Dokumen, Nomor Surat : 100.1.16/143/V/ITKAB, dengan merujuk ke Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, maka akan dilaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja OPD Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini saudara (i) diundang untuk menghadiri Rapat Evaluasi Triwulan I yang akan dilaksanakan pada :

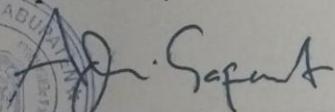
Hari/Tanggal : Jumat / 11 April 2025

Waktu : 08.30 Wita - Selesai

Tempat : Aula Diskominfo SP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. **Kepala Dinas,**


MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
Pangkat: Pembina IV-a
Nip.19790731 200604 1 019

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur Sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Luwu Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Kodepos 92981

Email : Kominfo@luwutimurkab.go.id

Tanggal : 11 April 2025
Tempat : Aula Diskominfo-SP

ABSEN RAPAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN	KETERANGAN
		L	P		
1					
2	Andrix	L			
3	Hicrudin	L			
4	Andi Heli	L			
5	MUH. AKBAR DARIF	L			
6	MASMI		P		
7	Ratna Nasir		P		
8	Herdiyanti		P		
9	Selvy		P		
10	MAE Yurita		P		
11	Anuisa adel		P		
12	Rahmi T		P		
13	Rabika		P		
14	Besse WU Nabila		P		
15	wima RUSLA		P		
16	FIRIANI		P		
17	Salma LCH		P		
18	Agus Hermawan	L			
19	LERRY. PRAG	L			
20					
21	Novita Sari		P		
22					
23					
24					

